

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PARIWISATA RELIGI BERBASIS MODERASI AGAMA

Nur Anim Jauhariyah

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

animjauhariyah@gmail.com

Abstract: *The development of a religious tourism policy based on religious moderation in Banyuwangi Regency aims to analyze the application of religious tourism indicators as an effort to increase the quantity and quality of domestic and foreign tourist visits while maintaining religious moderation. The research method uses a qualitative approach with expert respondents from Bappeda, the Culture and Tourism Service, and the Banyuwangi Regency Tourism Awareness Group. The analysis technique uses Analytic Network Process (ANP). The research results show that the synthetic priority of developing a religious tourism policy based on religious moderation in Banyuwangi Regency on the criteria of tourist objects and attractions is 0.16 with a Kendall W concordance coefficient (rater agreement) with a high value. Visitors to religious tourism destinations who have diverse religious backgrounds and beliefs have various purposes for visiting these tourism destinations, apart from being a way to get closer to the Creator and the aim of fulfilling their life's desires. The synergy between the government, tourism managers and the community in promoting and preserving religious tourism must continue to be maintained in a sustainable manner without any conflict between beliefs.*

Keywords: *Religious Tourism, Religious Moderation, Analytic Network Process (ANP), Banyuwangi Regency.*

PENDAHULUAN

Dampak pariwisata merupakan studi yang paling sering mendapatkan perhatian masyarakat karena sifat pariwisata yang dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pariwisata menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah dampak terhadap ekonomi, terhadap sosial-budaya serta terhadap lingkungan.

Pemikiran Keynesian (Spithoven, 2017)¹ intervensi pemerintah sangat diperlukan pada saat terjadinya krisis terutama krisis akibat tidak terpenuhinya asumsi-asumsi dalam pemikiran ekonomik klasik seperti *full employment* dan distribusi pendapatan yang tidak

¹ Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Diakses di https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_KeynesTheoryofEmployment.pdf



merata (Keynes, 1973a). Dalam tradisi Keynesian keberadaan resesi merupakan buah dari kegagalan pasar secara luas, dalam kondisi ini kelompok Keynesian mampu menyediakan ruang secara ilmiah tentang intervensi pemerintah dalam perekonomian, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal *countercyclical* (Priyono & Ismail, 2012).²

Pariwisata sehat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tanggal 3 Agustus 2005 tentang Kabupaten/Kota Sehat, yang merupakan peran penting untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dalam mengembangkan sektor wisata yang tidak hanya memenuhi unsur kebersihan dan kesehatan namun juga upaya untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung.³

Penelitian Li, et al (2011) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial, ekologis, dan kesehatan manusia.⁴ Destinasi pariwisata prioritas adalah pengembangan ekosistem, lalu diikuti oleh penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, pengembangan aksesibilitas dan konektifitas, pengembangan investasi pariwisata, strategi dan pengembangan atraksi.⁵

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata alam, buatan, religi, dan beberapa potensi pariwisata yang memperhatikan konsep halal tourism. novasi-inovasi dalam pariwisata terus digulirkan supaya dapat menarik segmen pasar. Seperti halnya pada konsep wisata halal juga dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi dengan konsep wisata yang berbeda dengan destinasi wisata yang lainnya. Keberadaan halal friendly tourism ini merupakan langkah pemerintah untuk menangkap peluang.⁶

Pariwisata religi di Kabupaten Banyuwangi memiliki ketertarikan tersendiri, karena pengunjung wisata religi terdiri dari beragam suku budaya agama dan kepercayaan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga moderasi agama supaya tidak ada perpecahan dalam melestarikan pariwisata yang damai di Kabupaten Banyuwangi. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial masyarakat dalam berintraksi antar manusia perlu dimiliki

² Jauhariyah, Nur Anim; Syafa'at, Ahmad Munib; Khusnudin, Iman. Analisis Potret Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi. **SIFEBRI'S**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 156-162, aug. 2023. ISSN 3025-3489. Available at: <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/sifebri/article/view/3320>>

³ Jauhariyah, Nur Anim; Soekardjo, Soekardjo; Hariyono, Pipit. (2021) Pengabdian dalam Upaya Pencapaian Kondisi Peremukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat Dalam Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi Sehat di Tahun 2021. *Loyalitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 105-113, may 2021. ISSN 2621-4687. Available at: <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/920>>. doi: <https://doi.org/10.30739/loyal.v4i1.920>.

⁴ Liu, Lin. 2011. *Research on Moral Hazard of Tourism Enterprise on the Basis of Game Theory*. Q. Zhou (Ed.): ISAEBD 2011, Part I, CCIS 208, pp. 602–606, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

⁵ Hefriansyah. 2020. Analisis Problematika Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Kota Pematangsiantar Sebagai Penyangga Destinasi Prioritas Danau Toba. Disertasi. Disertasi UINSU. <http://repository.uinsu.ac.id/9335/1/Disertasi%20Hefriansyah%20S3%20UINSU%20FEBI%202016-2020.pdf>

⁶ Jauhariyah, N. (2019). Halal Friendly Tourism Policy In Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 81-89. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.222>



setiap anggota masyarakat. Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang sering terjadi, juga terdapat pada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Hogwood and Lewis (1984: 12)⁷ mengemukakan bahwa:

“Policy analysis is both old and new. It is old because it draws on disciplines which have been analysing the activities of government for decades and on techniques which have been developed for decisionmaking outside government. It is new because there has undoubtedly been an increased interest over the past twenty years in the analysis of policy as a focus (as opposed to specific disciplinary or professional focuses). This increased interest has been accompanied both by grandiose claims for how ‘policy science’ can improve the decisionmaking capacity and the outputs of government, and by imitative relabelling as ‘public policy’ of traditional courses in government or public administration. A study of the origins of this interest can help us to understand the current status of policy studies and policy analysis, and the prospects for the future”. “To speak of an orientation’ is to suggest a tendency rather than an organized movement, and this seems appropriate, since many people have come to the analysis of policy from many points of departure and for many different reasons. If this diversity has produced some richness it has also produced a good deal of confusion, not least in the different usages of basic terms. The word ‘policy’ is indeed one in everyday use, both among academics and practitioners, but it is used in a variety of different ways”

Analisis kebijakan aliran lama dan baru, sudah lama dilaksanakan karena mengacu pada disiplin ilmu yang telah menganalisis kegiatan pemerintah selama beberapa dekade dan pada teknik yang telah dikembangkan untuk pengambilan keputusan di luar pemerintah. Ini baru karena tidak diragukan lagi ada peningkatan minat selama dua puluh tahun terakhir dalam analisis kebijakan sebagai fokus (yang bertentangan dengan fokus disiplin ilmu atau profesional tertentu). Minat yang meningkat ini disertai oleh klaim muluk tentang bagaimana ‘ilmu kebijakan’ dapat meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan dan output pemerintah, dan dengan menirukan ulang secara acak sebagai ‘kebijakan publik’ dari kursus tradisional dalam pemerintahan atau administrasi publik. Sebuah studi tentang asal-usul minat ini dapat membantu kita memahami status terkini dari studi kebijakan dan analisis kebijakan, dan prospek masa depan.

Menurut Parsons (2005: 1)⁸ mengemukakan:

“Policy choices are made about how disaffected, at risk young people are to be provided for, and these policy choices are not contained simply within an education policy and practice setting. The policy responses emerge from national and local government decision-making. They correlate with national indicators of punitiveness in the criminal justice system and the scale of inequalities tolerated. Policies resonate with deep-seated cultural positions which are linked to the willingness to pay – for prevention or for punishment – and with the propensity

⁷ Jauhariyah, Nur Anim; Hariyati, Yuli; Viphindartin, Sebastiana; Priyono, Teguh Hadi. Healthy Tourism Development Policy in Realizing Sustainable Development in Indonesia. The Seybold Report vol 17 no 08 pp. 1636-1651

⁸ Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2005.00290.x>



to allocate blame either to individuals and families or to societal failures. Opportunities for intervention at points in the reinforcing cycle of punitiveness are indicated”.

Pilihan kebijakan dibuat tentang betapa tidak puasny, pada risiko kaum muda harus disediakan, dan pilihan kebijakan ini tidak terkandung hanya dalam kebijakan pendidikan dan pengaturan praktik. Respons kebijakan muncul dari pengambilan keputusan pemerintah pusat dan daerah. Mereka berkorelasi dengan indikator nasional hukuman dalam sistem peradilan pidana dan skala ketidaksetaraan ditoleransi. Kebijakan beresonansi dengan posisi budaya yang kuat yang terkait dengan kesediaan untuk membayar, untuk pencegahan atau hukuman, dan dengan kecenderungan untuk mengalokasikan menyalahkan baik kepada individu dan keluarga atau dengan kegagalan sosial. Peluang untuk intervensi pada titik-titik dalam siklus penguatan hukuman ditunjukkan.

MODERASI BERAGAMA

Pengertian Moderasi Beragama Moderasi asal mulanya dari bahasa Latin moderatio, artinya ke-sedang-an (tidak berlebihan juga tidak kekurangan). Moderat juga dimaknai sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan dan kekurangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua makna moderasi, yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari keekstreman. Jika ada yang berkata, “orang itu bersikap moderat,” itu artinya orang tersebut bersikap biasa saja, wajar dan tidak ekstrem.⁹

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi lebih dipahami dengan wasath atau wasathiyyah, yang mempunyai persamaan arti dengan kata tawassuth (tengah-tengah), l’tidal (adil) dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyyah bisa disebut wasith. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘wasit’ yang memiliki tiga pengertian yakni penengah atau perantara, pelera/pemisah/pendamai, dan pemimpin di pertandingan.¹⁰

Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan pembenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya, di samping itu juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernagama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Penghormatan serta penerimaan adanya umat beragama lainnya ditunjukkan dengan berhubungan dan berinteraksi dalam kebiasaan sosial.¹¹

Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama, baik kepada sesama pemeluk agama Islam, maupun antar pemeluk agama. Sikap moderasi tidak begitu saja hadir, namun dapat diciptakan dengan

⁹ Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

¹⁰ Kementerian, Moderasi Beragama, 16

¹¹ Kementerian Agama RI, Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), 2019), 10



cara membangun pengetahuan dengan baik, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar.¹²

POTRET WISATA RELIGI DI KABUPATEN BANYUWANGI

1) Masjid Baiturrahman Banyuwangi



Gambar 1. Potret Masjid Baiturrahman Banyuwangi

Masjid ini sarat akan sejarah penyebaran Islam pertama kali di Blambangan. Terdapat Al-Qur'an raksasa di sana dan telah menjadi tradisi unik tadarus di bulan Ramadan. Arsitektur masjid merupakan perpaduan kebudayaan Banyuwangi dengan unsur Islam. Kebudayaan Banyuwangi bisa dilihat pada ornamen yang menghiasi masjid ini seperti motif ukiran Gajah Oling yang terdapat pada mimbar masjid. Gajah Oling bermakna mengingat Allah SWT, menjalankan segala perintah-Nya, juga melaksanakan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai jalan terbaik dalam menjalani kehidupan ini.

2) Masjid Muhammad Cheng Ho Banyuwangi



Gambar 2. Potret Masjid Muhammad Cheng Ho Banyuwangi

Masjid Muhammad Cheng Ho Banyuwangi merupakan sebuah masjid bergaya arsitektur paduan Tiongkok dan Arab yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Masjid ini merupakan masjid Cheng Ho yang kesepuluh yang tersebar di

¹² Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 40

seluruh Indonesia. Berdirinya masjid ini merupakan inisiatif warga keturunan Tionghoa-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan donatur pembangunan berasal dari masyarakat setempat, warga Tionghoa, serta Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Jawa Timur.

3) Makam Waliulloh Datuk Ibrahim



Gambar 3. Potret Makam Datuk Ibrahim Banyuwangi

Makam Datuk Ibrahim yang merupakan salah satu destinasi wisata religi yang paling banyak dikunjungi. Berdasarkan sejarah, Datuk Malik Ibrahim (Abdurrahim Bauzir), yang akrab disapa Mbah Datuk merupakan bangsawan asal Yaman keturunan Bani Hasyim. Almarhum adalah wali besar yang berperan dalam menyebarkan Islam di Banyuwangi serta di Loloan, Jember, Bali. Datuk Ibrahim Bauzir datang ke Nusantara, sekitar tahun 1770 dan transit di Banyuwangi yang dulunya bernama Blambangan. Datuk kemudian memilih siar Islam ke daerah Loloan, Bali, karena penduduk daerah ini mayoritas masih beragama Hindu. Sekarang di Loloan mayoritas warganya beragama Islam.

4) Makam Mbah Kyai Hasan Abdillah Glenmore Banyuwangi



Gambar 4. Potret Makam Mbah Kyai Hasan Abdillah Glenmore Banyuwangi

Makam mbah Yai Hasan Abdillah menjadi salah satu tujuan wisatawan religi di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. KH. Hasan Abdillah merupakan salah satu Ulama sekaligus waliyullah berpengaruh di Banyuwangi (1929-2012), lahir dari keturunan orang-orang salih. Lebih lengkapnya nama beliau yaitu: Hasan Abdillah bin Achmad Qusyairi bin Shiddiq (Mbah Muhammad Shiddiq Jember) bin Abdulla bin Sholeh bin

Asy'ari bin Adzro'i bin Yusuf bin Abdur Rahman Basyaiban yang akrab dengan julukan Mbah Sambu atau juga Raden Syihabuddin Sambu Digdodiningrat.

5) Makam Kyai Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur Blokagung Banyuwangi



Gambar 4. Potret Makam Mbah Yai Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi

Makam Kh. Mukhtar Syafa'at. Desa Wisata Karangdoro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Almarhum semasa hidup beliau memiliki kharismatik yang tinggi dengan berbagai tirakat yang istiqomah dilaksanakan. Makam mbah Yai Syafa'at tidak pernah sepi dikarenakan disamping pengunjung dari luar, santri mbah Yai yang berjumlah sekitar delapan ribu santri selalu memenuhi makam dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an.

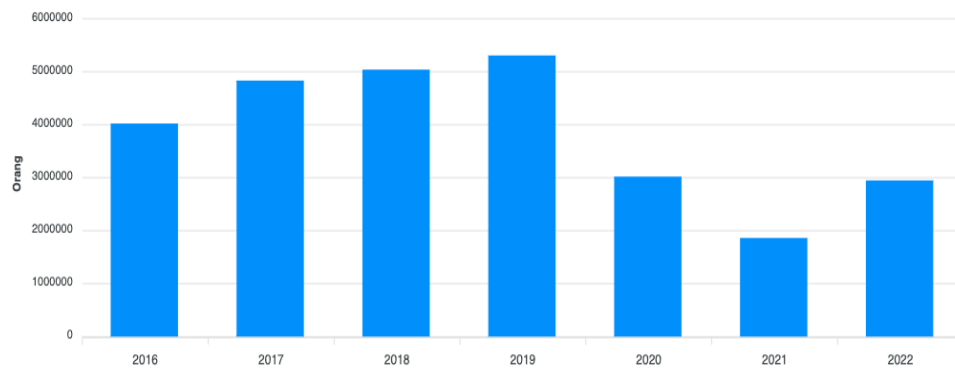
KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

Dinas Pariwisata Banyuwangi mencatat angka kunjungan wisatawan nasional dan turis mancanegara di destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2016-2018 mengalami kenaikan. Namun mulai Tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara mengalami penurunan dan diikuti kunjungan wisatawan domestik Tahun 2020, hal ini dikarenakan Dunia sedang terserang wabah Covid 19.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banyuwangi

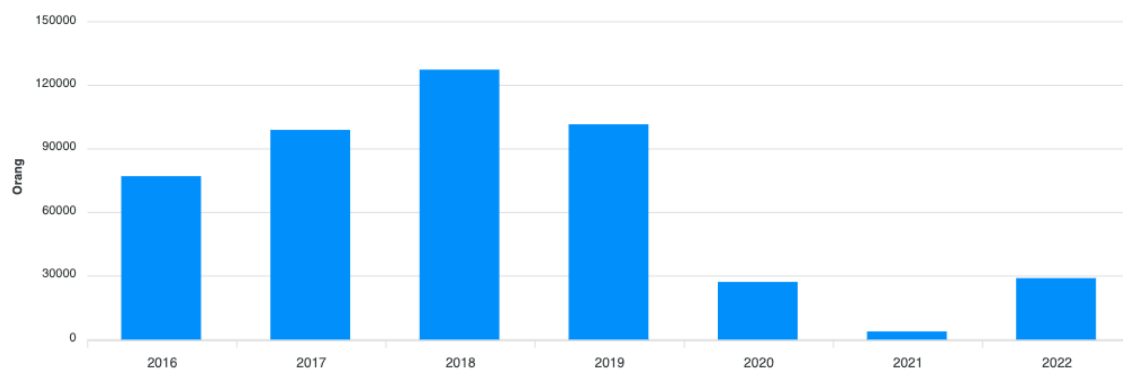
Indikator (Jiwa)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	77139	98970	127420	101622	27224	3854	29020
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	4022449	4832999	5039934	5307054	3019875	1862553	2948543

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2023



Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik di Kabupaten Banyuwangi¹³

Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan domestik mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar -43,10% dan Tahun 2021 sebesar -38,32%. Tahun 2022 kunjungan wisatawan mulai mengalami kenaikan



Gambar 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik di Kabupaten Banyuwangi¹⁴

Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar -73,21% dan Tahun 2021 sebesar -85,84%. Berbagai peningkatan, peningkatan pendapatan perkapita dari sektor pariwisata, dan peningkatan jumlah pengunjung merupakan salah satu capaian dalam sektor pariwisata. Namun dikarenakan dengan adanya musibah internasional dengan maraknya Covid 19, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan jumlah pengunjung dan PAD dari sektor pariwisata tersebut.

Prioritas sintesis pengembangan pariwisata sehat di Kabupaten Banyuwangi pada kriteria obyek dan daya tarik wisata sebesar 0,16242 dengan *kendall's coefficient of concordance W* (rater agreement) dengan nilai yang tinggi. Sintesis cluster, elemen, dan jaringan dalam menentukan prioritas masalah dalam kebijakan pengembangan pariwisata

¹³ Banyuwangi Satu Data, Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik, (Kabupaten Banyuwangi:2023).

¹⁴ Banyuwangi Satu Data, Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik, (Kabupaten Banyuwangi:2023).

sehat apalagi pada kondisi pandemi Covid 19 di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa prioritas kebijakan peran campur tangan pemerintah terletak pada pengembangan obyek dan daya tarik wisata supaya menjadi tujuan wisatawan yang akan mampu mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pasar dimana destinasi wisata merupakan salah satu barang publik yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Nilai *rater agreement* pada masing-masing cluster pada metode *kendall's coefficient of concordance* dalam menentukan prioritas kebijakan pengembangan pariwisata sehat di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa besarnya kesepakatan responden rata-rata dengan nilai yang tinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengembangan pariwisata sehat di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan zona tujuan dan objek wisata menjadi prioritas strategi pengembangan pariwisata sehat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata sehat sangat penting dalam memaksimalkan pembangunan berkelanjutan karena dengan adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan baik dari hulu dan hilir yang dimungkinkan akan mengancam kelestarian dari keberlangsungan destinasi wisata sebagai kawasan barang publik yang mampu memberikan kontribusi yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi.

KESIMPULAN

Pengunjung destinasi wisata religi yang memiliki keragaman latar belakang agama dan kepercayaan mempunyai tujuan yang beragam untuk mengunjungi wisata tersebut, disamping sebagai cara untuk mendekatkan pada sang pencipta dan tujuan untuk melancarkan hajat hidupnya. Sinergitas antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian wisata religi tersebut harus terus dipelihara secara berkelanjutan tanpa adanya konflik antar kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banyuwangi Satu Data. 2023. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik. Kabupaten Banyuwangi. Diakses di <https://satudata.banyuwangikab.go.id/dataset?pencarian=kunjungan+wisata>
- Banyuwangi Satu Data. 2023. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara. Kabupaten Banyuwangi. Diakses di <https://satudata.banyuwangikab.go.id/dataset?pencarian=kunjungan+wisata>
- Hefriansyah. 2020. Analisis Problematika Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Kota Pematangsiantar Sebagai Penyangga Destinasi Prioritas Danau Toba. Disertasi. UINSU. <http://repository.uinsu.ac.id/9335/1/Disertasi%20Hefriansyah%20S3%20UINSU%20FEBI%202016-2020.pdf>
- Jauhariyah, N. 2019. Halal Friendly Tourism Policy In Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 81-89. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.222>



- Jauhariyah, Nur Anim; Soekardjo, Soekardjo; Hariyono, Pipit. 2021 Pengabdian dalam Upaya Pencapaian Kondisi Permukiman, Sarana, dan Prasarana Sehat Dalam Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi Sehat di Tahun 2021. *Loyalitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 105-113, may 2021. ISSN 2621-4687. Available at: <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/920>>. doi: <https://doi.org/10.30739/loyal.v4i1.920>.
- Jauhariyah, Nur Anim; Hariyati, Yuli; Viphindartin, Sebastiana; Priyono, Teguh Hadi. 2022. Healthy Tourism Development Policy in Realizing Sustainable Development in Indonesia. *The Seybold Report* vol 17 no 08 pp. 1636-1651
- Jauhariyah, Nur Anim; Syafa'at, Ahmad Munib; Khusnudin, Iman. 2023. Analisis Potret Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyuwangi. **SIFEBRI'S**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 156-162, aug. 2023. ISSN 3025-3489. Available at: <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/sifebri/article/view/3320>>
- Kementerian Agama RI. 2019. Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), 2019), 10
- Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Diakses di https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_KeynesTheoryofEmployment.pdf
- Liu, Lin. 2011. *Research on Moral Hazard of Tourism Enterprise on the Basis of Game Theory*. Q. Zhou (Ed.): ISAEED 2011, Part I, CCIS 208, pp. 602–606, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Muhammad Qasim. 2020. Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 40
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2005.00290.x>

